

**HUBUNGAN *CORPORATE SOCIAL
DISCLOSURE* DAN *EARNINGS MANAGEMENT*:
STUDI EMPIRIS BERDASARKAN *POLITICAL
COST HYPOTHESIS***

**(Studi Kasus Pada Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar di BEI Tahun
2005-2009)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

ARMYTHA MAHARANI PURWAMITHA

NIM C2C007018

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Armytha Maharani Purwamitha

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **HUBUNGAN *CORPORATE SOCIAL DISCLOSURE* DAN *EARNINGS MANAGEMENT*: STUDI EMPIRIS BERDASARKAN *POLITICAL COST HYPOTHESIS* (Studi Kasus Pada Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar di BEI 2005-2009)**

Dosen Pembimbing : Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 3 Maret 2011

Dosen Pembimbing,

(Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt.)

NIP 19810813 200801 2007

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Armytha Maharani Purwamitha

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **HUBUNGAN *CORPORATE SOCIAL***

DISCLOSURE DAN EARNINGS

MANAGEMENT: STUDI EMPIRIS

BERDASARKAN POLITICAL COST

HYPOTHESIS (Studi Kasus Pada

Perusahaan Non Finansial yang

Terdaftar di BEI 2005-2009)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 11 Maret 2011

Tim Penguji

1. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt. (.....)

2. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D. (.....)

3. Dr. Jaka Isgiyarta, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Armytha Maharani Purwamitha, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Hubungan *Corporate Social Disclosure* dan *Earnings Management*: Studi Empiris Berdasarkan *Political Cost Hypothesis***, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 Maret 2011

Yang membuat pernyataan,

(Armytha Maharani Purwamitha)

NIM C2C007018

ABSTRACT

This study investigates political cost hypothesis to obtain empirical evidence about earnings manipulation. This study also aims to examine the relation between the extent of corporate social disclosure (CSD) and earnings management. This issue is examined within the context of earnings management in response to government regulatory threat by non-finance firms that are published in Indonesia Stock Exchange.

Manipulation to reduce reported earnings estimates by negative discretionary accruals. Measurement of corporate social disclosure is based on corporate social disclosure index that seen from company's annual report. Data was analyzed using classical assumption and linear regression.

The analysis found significant negative discretionary accruals during period of the regulatory threat appearance. Furthermore, the results also show that pre-event corporate social disclosure has no significant impact on earnings management.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Social Disclosure (CSD), government regulatory, earnings management, political cost hypothesis, non-finance firms.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji *political cost hypothesis* untuk menemukan bukti empiris adanya manipulasi *earnings* serta menganalisis hubungan antara luas *corporate social disclosure* (CSD) dan *earnings management* (EM). Isu ini diuji dalam konteks respon terhadap munculnya tekanan politik, yaitu regulasi pemerintah pada perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI.

Manipulasi untuk mengurangi *reported earnings* ditandai dengan *discretionary accruals* negatif. Pengukuran *corporate social disclosure* (CSD) didasarkan pada *corporate social disclosure index* yang dilihat dari laporan tahunan perusahaan. Data dianalisis dengan menggunakan asumsi klasik dan regresi linear.

Hasil analisis menunjukkan adanya *discretionary accruals* negatif yang signifikan pada periode munculnya regulasi pemerintah. Sementara itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan CSD pada periode sebelum adanya tekanan politik terhadap *earnings management*.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Social Disclosure (CSD), regulasi pemerintah, earnings management, political hypothesis, perusahaan non finansial.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Hubungan *Corporate Social Disclosure* dan *Earnings Management*: Studi Empiris Berdasarkan *Political Cost Hypothesis*””. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Ibu Nur Cahyonowati, SE., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, nasehat, teguran, dukungan dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Much. Syafrudin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Surya Rahardja, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali.

5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Papa dan Mama tersayang, terimakasih untuk semua doa, cinta, kasih sayang, kesabaran, pelajaran, perhatian, dukungan dan motivasi baik moril maupun materiil yang tidak pernah putus. Semoga penulis selalu dapat memberikan yang terbaik, menjadi anak yang berbakti dan membanggakan untuk Papa dan Mama.
7. Adikku tersayang Yopi Yunanto MP dan Keluarga Besar yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian dan kebahagiaan.
8. Teman-teman SMP dan SMA yang masih mewarnai kehidupan penulis, *especially to* sahabat *gegeloan* dari SMA, Hanifah 'Ipunk'.
9. Teman-teman Akuntansi 2007 yang selalu membuat penulis tersenyum, teman sepermainan yang dengan luar biasa membuat hari-hari penulis berwarna Rahmi, Arum, Idha, Ludy, Ajie, Panky, Seno, Resti, Panggah, Jiwo, Aziz, Ovi, Oya, Prima, Wawan, Ryan dan teman 'nyunda' Amel. Terimakasih atas persahabatan, canda tawa dan kekeluargaannya didalam kelas maupun diluar kelas yang sangat berharga bagi penulis. Teman-teman yang mengajarkan 'sesuatu' pada penulis Nourma, Toky, Rizka, Hesti, Anind, Venda, almh. Santi, Nitiya. Sukses selalu!
10. Teman-teman KKN Karang Tempel, tempat konsultasi penulis Dina, Dona, Kiki, Mba Riza, Aftina, Icha, Lusy, Rani, Mas Isna, Mas Awink, Jacob dan Mas Ardy. Terimakasih atas kenangan 30 hari yang tidak terlupakan !

11. *That peculiar guy. Thank You. You.*

12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun kiranya dapat menjadi satu sumbangan yang berarti dan penulis harapkan adanya saran dan kritik untuk perbaikan di masa mendatang.

Semarang, 1 Maret 2011

Penulis,

Armytha Maharani Purwamitha

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“If you can dream it, you can do it.”

– Walt Disney

“Happiness is when you think, what you say, and what you do are in harmony.”

– Mahatma Gandhi

“Gapailah langit, karena jika meleset pun, kau tetap kan berada di antara bintang-bintang.”

– Rosa Torcasio

“Man Jadda Wa Jadd”

Kau Kan Mendapatkan Apa Yang Kau Usahakan

Kupersembahkan:

Teruntuk Papa dan Mama yang telah membesarkan dan mengajarkanku banyak hal

Untuk Adikku

Untuk keluarga besar yang selalu mendukungku

Dan

Untuk teman-temanku yang telah menjadi keluarga kedua bagiku

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	11
2.1.1. <i>Earnings Management (EM)</i>	11
2.1.2. <i>Political Cost Hypothesis</i>	13
2.1.3. <i>Corporate Social Disclosure</i>	14
2.1.4. Penelitian Terdahulu	21
2.2. Kerangka Pemikiran	23
2.3. Perumusan Hipotesis	28
2.3.1. <i>Discretionary Accruals</i>	28
2.3.2. Luas <i>Corporate Social Disclosure</i>	29
BAB 3 METODE PENELITIAN	31
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	31
3.1.1. Variabel Terikat (Dependen)	31
3.1.2. Variabel Bebas (Independen).....	32

3.1.3. Variabel Kontrol	34
3.1.3.1. Leverage	35
3.1.3.2. <i>Operating Cash Flow</i>	35
3.1.3.3. Nilai Absolut <i>Total Accruals</i>	35
3.1.3.4. <i>Discretionary Accruals</i> Periode Sebelumnya	36
3.2. Populasi dan Sampel	36
3.3. Jenis dan Sumber Data	37
3.4. Metode Pengumpulan Data	38
3.5. Metode Analisis	38
3.5.1. Statistik Deskriptif	38
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	38
3.5.2.1. Uji Normalitas	38
3.5.2.2. Uji Multikolonieritas	40
3.5.2.3. Uji Autokolerasi	40
3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas	41
3.5.3. Uji Hipotesis	41
3.5.3.1. Uji Hipotesis Pertama (H_1)	41
3.5.3.2. Uji Hipotesis Kedua (H_2)	43
3.5.4. Uji <i>Goodness of Fit</i>	44
3.5.4.1. Uji Koefisien Determinasi	44
3.5.4.2. Uji Signifikansi Stimultan (Uji Statistik F)	44
3.5.4.3. Uji Siginifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	46
4.1.1. Sampel Penelitian	46
4.1.2. <i>Earnings Management</i>	48
4.2. Analisis Data	51
4.2.1. Statistik Deskriptif	51
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	55
4.2.2.1. Uji Normalitas	55
4.2.2.2. Uji Multikolonieritas	59

4.2.2.3. Uji Autokolerasi	60
4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas	61
4.2.3. Hasil Uji Hipotesis	63
4.2.3.1. Uji <i>Goodness of Fit</i>	63
4.2.3.1.1. Uji Koefisien Determinasi	63
4.2.3.1.2. Uji Signifikansi Stimultan (Uji Statistik F).....	65
4.2.3.1.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	66
4.2.3.2. Pengujian Hipotesis	68
4.2.3.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)	68
4.2.3.2.2. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2).....	64
4.3. Interpretasi Hasil	69
4.3.1. <i>Discretionary Accruals</i>	69
4.3.2. Pengaruh Luas CSD terhadap <i>Discretionary Accruals</i>	70
BAB V PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Keterbatasan Penelitian	73
5.3. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Ringkasan Populasi dan Sampel Penelitian	47
Tabel 4.2 <i>Discretionary Accruals</i> (DACC) Tahun 2005-2009	48
Tabel 4.3 Perbandingan Jumlah Perusahaan Dengan <i>Discretionary Accruals</i> (DACC) Positif dan Negatif Tahun 2005-2006	50
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Model (3.3)	59
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Model Regresi (3.4)	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test Model Regresi (3.3).....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test Model Regresi (3.4)	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi (3.3)	59
Tabel 4.9 Hasil Runs Test Model Regresi (3.3)	60
Tabel 4.10 Hasil Runs Test Model Regresi (3.4)	60
Tabel 4.11 Hasil Uji White Model Regresi (3.3)	62
Tabel 4.12 Hasil Uji Glejser Model Regresi (3.4).....	62
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi (3.3).....	63
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi (3.4)	64
Tabel 4.15 Uji Statistik F Model Regresi (3.3).....	65
Tabel 4.16 Uji Statistik F Model Regresi (3.4).....	65
Tabel 4.17 Hasil Uji t Model Regresi (3.3)	66
Tabel 4.18 Hasil Uji t Model regresi (3.4).....	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 <i>Discretionary Accruals</i> (DACC) Tahun 2005-2009	49
Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas Model Regresi (3.3)	55
Gambar 4.3 Grafik Normal Plot Uji Normalitas Model Regresi (3.3)	56
Gambar 4.4 Grafik Histogram Uji Normalitas Model Regresi (3.4).....	57
Gambar 4.5 Grafik Normal Plot Uji Normalitas Model Regresi (3.4)	58

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Item-item CSD	80
LAMPIRAN B Nama Perusahaan Sampel	85
LAMPIRAN C Hasil Output SPSS dan Eviews Model Regresi (3.3)	88
LAMPIRAN D Hasil Output SPSS Model Regresi (3.4)	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Maraknya peristiwa yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena kerusakan lingkungan akibat beroperasinya perusahaan di lingkungan mereka semakin menimbulkan sinisme masyarakat terhadap keberadaan perusahaan. Perusahaan dianggap didirikan hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bagi pemegang saham tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup disekitar perusahaan menjalankan aktivitasnya. Sebenarnya, berdirinya perusahaan tidak lepas dari peran perusahaan kepada masyarakat disekitarnya. Tindakan perusahaan telah membawa dampak terhadap kualitas kehidupan manusia, terhadap individu, masyarakat dan seluruh lingkungan disekitarnya.

Menurut Gray *et al.* (dalam Sembiring, 2005) tumbuhnya kesadaran publik akan peran perusahaan di tengah masyarakat melahirkan kritik karena menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat *safety* produk, serta hak dan status tenaga kerja. Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga oleh komunitas di sekelilingnya (Rahman, 2009). Fenomena inilah yang telah memicu munculnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Yuniarti, 2007).

Tuntutan kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas CSR semakin tidak terelakkan. Tanggung jawab pengelolaan perusahaan yang semula hanya kepada pemegang saham telah bergeser ke *stakeholder*. Ketika perhatian perusahaan hanya kepada pemegang saham, banyak aksi protes yang dilakukan oleh elemen stakeholder yang lain. Mereka menuntut keadilan kebijakan upah dan perhatian terhadap kesejahteraan oleh perusahaan. Di sisi lain, masyarakat memprotes pencemaran lingkungan akibat polusi dan limbah dari beroperasinya perusahaan. Hal ini mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dan lingkungan sosialnya.

Aktivitas CSR perusahaan perlu diungkapkan kepada *stakeholder*. Tujuan dari aktivitas pengungkapan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh stakeholder terkait pelaksanaan program CSR. Untuk itu perusahaan dituntut dapat memberikan informasi tentang aktivitasnya dengan lebih transparan. Aktivitas maupun praktek pelaporan CSR yang dilakukan perusahaan akan berdampak pada citra perusahaan itu sendiri (Rahman, 2009). Oleh karena itu, *Corporate Social Disclosure* (CSD) yang baik menjadi sangatlah penting.

Untuk mencapai legitimasi, perusahaan perlu menunjukkan kepatuhannya terhadap standar sosial. Kesalahan oleh perusahaan untuk melegitimasi aktivitas CSR, berakibat terjadinya konflik antara kelompok stakeholder dengan perusahaan. Kesalahan perusahaan ini memungkinkan munculnya peraturan pemerintah (Raar, 2007).

Di Indonesia, pelaksanaan aktivitas dan pelaporan CSR telah bergeser dari *voluntary* ke *mandatory*. Kewajiban untuk melaksanakan peran CSR dan pelaporan CSD semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban bagi semua perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini menjadikan Indonesia satu-satunya negara di dunia yang mewajibkan pelaporan CSD secara eksplisit dalam undang-undang. Hal ini bukan berarti negara lain tidak memiliki peraturan mengenai hal tersebut, karena di setiap negara pasti ada peraturan mengenai perlindungan buruh, pelestarian lingkungan, dan komponen CSR lainnya (Gunawan, 2010).

Pengaruh munculnya regulasi pemerintah, yaitu UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap CSD telah diteliti oleh Sumedi (2010). Hasil penelitian ini adalah munculnya regulasi pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap CSD. Selanjutnya Sumedi menyatakan bahwa dengan adanya regulasi pemerintah yang bersifat memaksa dan mengikat, perusahaan akan melaporkan CSD sebagai bentuk ketaatan atas regulasi.

Munculnya regulasi pemerintah merupakan salah satu bentuk tekanan politik yang akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan. Atas alasan tersebut perusahaan memiliki insentif untuk melakukan strategi yang dapat mengurangi dampak dari tekanan politik (Cahan, 1992; Cahan *et al.*, 1997; Han dan Wang, 1998; Patten dan Trompeter, 2003). Untuk menghindari dampak negatif tindakan

pemerintah, perusahaan melakukan praktek CSD dan *earnings managements* (EM).

Accounting earnings merupakan salah satu *earnings* yang paling mendapatkan perhatian dari elemen *stakeholder* terutama *shareholder*, investor, pemasok dan karyawan (Prior *et al.*, 2008). Manajer mengambil keuntungan dari fleksibilitas GAAP untuk mengelola *earnings* yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Gargouri *et al.*, 2010). Manajer dapat memilih kebijakan akuntansi dalam menghitung *earnings* tanpa melanggar GAAP. Strategi manajer ini dapat membuat *earnings* yang disajikan lebih besar atau lebih kecil dari yang sebenarnya terjadi. Hal ini yang disebut dengan *earnings management* (EM).

Scott (2006) menyatakan ada dua motivasi yang melatarbelakangi praktek EM oleh perusahaan, yaitu efisiensi pasar modal dan perjanjian kontrak. Kedua motivasi ini juga diungkapkan oleh Healy dan Wahlen (1999, dalam Prior, 2006) yang menambahkan regulasi sebagai salah satu motivasi praktek EM. Manajer perusahaan pada sektor yang diregulasi memiliki insentif untuk melakukan EM agar dapat menghindar dari ancaman politik yang dianggap merugikan bagi perusahaan.

Beberapa penelitian telah meneliti hubungan tekanan politik dan strategi perusahaan dengan menguji *political cost hypothesis* (Cahan, 1992; Cahan *et al.*, 1997; Han dan Wang; 1998; Patten dan Trompeter, 2003). Penelitian-penelitian tersebut telah menguji *discretionary accrual* yang dilakukan perusahaan untuk memanipulasi *earnings* pada periode adanya tekanan politik. Salah satu dari penelitian tersebut, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Patten dan

Trompeter (2003) menguji hubungan tingkat manipulasi yang dilakukan perusahaan dengan *environmental reporting* yang sama-sama dilakukan untuk mengurangi dampak tekanan politik terhadap perusahaan. Manajemen memiliki dorongan untuk mempertahankan citra positif finansial perusahaan melalui penurunan *reported earnings*.

Patten dan Trompeter menyatakan bahwa CSD dan EM berhubungan satu sama lain. Seperti yang selanjutnya dinyatakan oleh Patten dan Trompeter bahwa perusahaan yang tidak merespon tekanan politik dengan CSD akan melakukan EM untuk menurunkan *earnings* untuk mengurangi ancaman atas tekanan politik. Ini berarti, residual atau *discretionary accrual*-nya negatif.

Penelitian sebelumnya yang juga dilakukan di luar negeri telah menguji hubungan CSD dan EM (Chih *et al.*, 2008; Prior *et al.*, 2008; Gargouri *et al.*, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Chih, *et al.* (2008), Prior *et al.* (2008) dan Gargouri *et al.* (2010) menguji hubungan CSD dan EM dalam konteks konsekuensi negatif yang muncul akibat EM terhadap *stakeholder* dan reputasi perusahaan. Salah satu cara untuk mengurangi dampak tersebut adalah dengan melakukan aktivitas CSR yang dipercaya perusahaan dapat membangun citra positif. Castelo dan Lima (2006, dalam Prior *et al.*, 2008) menjelaskan bahwa melalui praktek CSR, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak perlakuan yang lebih menguntungkan berkenaan dengan regulasi, serta mendapatkan dukungan dari kelompok aktivis sosial, legitimasi dari komunitas industri, dan pemberitaan positif dari media, yang pada akhirnya reputasi perusahaan tetap terjaga dengan baik.

Beberapa penelitian mengenai CSD telah dilakukan di Indonesia dan menggunakan laporan tahunan perusahaan sebagai sampel. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih cenderung pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR (Anggraini, 2006; Erwansyah, 2009; Puspitasari, 2009; Sumedi 2010), hubungan karakteristik perusahaan dengan pengungkapan CSR (Sembiring, 2005; Pribadi, 2009), dan luas pengungkapan CSR berdasarkan klasifikasi industri (Mirfazli dan Nurdiono, 2008; Nurhayati, 2009). Penelitian-penelitian di Indonesia belum ada yang mengaitkan praktek pengungkapan CSR dengan tingkat *earnings management* (EM)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan bukti empiris adanya manipulasi *earnings* pada periode disahkannya peraturan pemerintah. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menguji hubungan luas CSD sebelum munculnya regulasi pemerintah dan EM pada periode disahkannya regulasi pemerintah yang diukur berdasarkan perubahan *discretionary accruals* pada perusahaan non finansial yang terdaftar pada BEI tahun 2005-2009.

Penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Patten dan Trompeter (2003) yang mengasumsikan CSD dan EM sebagai strategi perusahaan dalam mengurangi ancaman politik. Penelitian oleh Patten dan Trompeter dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan kimia di India untuk menguji hubungan antara tingkat *enviromental disclosure* dan EM dalam konteks sebagai respon perusahaan terhadap Bhopal chemical leak yang terjadi pada Desember 1984. Penelitian ini

mengadopsi penelitian Patten dan Trompeter dalam konteks disahkannya regulasi pemerintah sebagai bentuk ancaman politik terhadap perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa tekanan publik terhadap perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosialnya semakin meningkat. Masalah lain adalah disahkannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 yang mewajibkan perseroan yang dalam menjalankan operasinya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaporkan kegiatan CSR-nya. Kemunculan tekanan politik seperti regulasi akan membuat manajemen memiliki insentif untuk melakukan strategi yang dapat mengurangi dampak dari ancaman politik (Cahan, 1992; Han dan Wang, 1998; Patten dan Trompeter, 2003). Untuk menghindari dampak negatif *political cost*, perusahaan melakukan praktek CSD dan EM.

Manajemen memiliki dorongan untuk menjaga reputasi finansial perusahaan dalam menghindari dampak ancaman politik dengan mengurangi *reported earnings* (Patten dan Trompeter, 2003). Cara yang dapat digunakan untuk mengurangi *earnings* adalah dengan memanipulasi *discretionary accruals*. Patten dan Trompeter (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang tidak merespon tekanan politik dengan CSD akan melakukan EM untuk menurunkan *earnings* dengan tujuan mengurangi ancaman atas tekanan politik.

Munculnya regulasi pemerintah yang dianggap sebagai ancaman politik terhadap perusahaan serta praktek CSD dan EM sebagai bentuk strategi

perusahaan dalam mengurangi tekanan politik menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan kekurangan penelitian sebelumnya dan pertimbangan yang telah dinyatakan sebelumnya, maka penelitian ini mencoba menemukan bukti adanya manipulasi *earnings* dan menganalisis hubungannya dengan luas CSD dalam konteks disahkannya UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI atau *go public*. Rumusan masalah yang coba dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *discretionary accruals* periode tahun 2007 menunjukkan nilai yang negatif?
2. Apakah luas pengungkapan CSD sebelum disahkannya regulasi pemerintah berhubungan positif dengan EM pada periode regulasi pemerintah disahkan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah menemukan bukti empiris mengenai:

1. Adanya *discretionary accruals* negatif pada periode tahun 2007 pada perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI atau *go public*.
2. Hubungan luas pengungkapan CSR dengan EM sebagai respon terhadap regulasi pemerintah pada perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI atau *go public*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Pelaku bisnis, secara empiris penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan maupun

stakeholder, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan sehubungan dengan penerapan CSD dan *earnings management*.

2. Regulator, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada regulator atas efektivitas penerapan UU Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.
3. Akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada buku pedoman penyusunan skripsi, yang terbagi menjadi lima bab, dengan susunan sebagaimana dijelaskan berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu berkaitan dengan topik/masalah yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Di dalam kerangka pemikiran tersebut dijelaskan juga mengenai variabel bebas dan variabel terikat dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian secara operasional, penentuan populasi dan sampel penelitian,

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN, bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya, atau sebagai bahan implikasi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. *Earnings Management* (EM)

Anthony dan Govindarajan (1995) menyatakan konsep *agency theory* sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Seorang *principal* menggunakan jasa *agent* untuk melaksanakan tujuan yang dikehendaki yakni mengelola sumber daya yang dimiliki oleh *principal*. Pada perusahaan-perusahaan publik, yang bertindak sebagai *principal* adalah pemegang saham (*shareholder*), sementara yang bertindak sebagai agen dan manajer.

Dalam *agency theory*, terdapat asumsi bahwa setiap individu hanya termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Hubungan antara *principal* dan *agent* tersebut ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini memicu para *agent* untuk berusaha memanipulasi angka akuntansi tersebut agar dapat dijadikan sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Bentuk tindakan *agent* tersebut sering disebut juga dengan *earnings management*.

Scott (2006) mendefinisikan *earnings management* sebagai pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer sehingga dapat mencapai beberapa tujuan yang spesifik. Manajer dapat memilih beberapa kebijakan akuntansi untuk menghitung *earnings* tanpa melanggar GAAP (Prior *et al.*, 2008). Cara yang efektif untuk mengurangi *earnings* yang dilaporkan adalah dengan memanipulasi kebijakan

akuntansi yang berhubungan dengan *accruals*. Misalnya, perusahaan meningkatkan biaya amortisasi, pencatatan kewajiban yang besar yang berkaitan dengan garansi produk, kontijensi, diskon, beban piutang tak tertagih atau yang berkaitan dengan pesediaan yang usang. Hal ini yang disebut dengan *discretionary accruals* (Scott, 2006). Besar manipulasi *earnings* yang dilakukan perusahaan diestimasi berdasarkan perubahan *discretionary accruals* (Cahan, 1992; Cahan *et al.*, 1997; Han dan Wang, 1998; Patten dan Trompeter, 2003; Scott, 2006; Chih *et al.*, 2008, Prior *et al.*, 2008; Chang *et al.*, 2010).

Total accruals terdiri dari jumlah *discretionary accruals* dan *non discretionary accruals*. *Discretionary accruals* adalah *accruals* yang dapat dikendalikan oleh manajer. Sedangkan *non discretionary accruals* adalah *accruals* yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer. Patten dan Trompeter (2003) menyatakan bahwa EM berhubungan dengan penggunaan *discretionary accruals* untuk memanipulasi besarnya *earnings* yang dilaporkan.

Ada dua motivasi yang membuat perusahaan melakukan praktek EM yaitu, untuk memenuhi harapan investor atas *earnings* perusahaan dan karena adanya perjanjian kontrak (Scott, 2006). Selain itu, menurut Healy dan Wahlen (1999, dalam Prior *et al.*, 2008) regulasi juga dapat menjadi motivasi bagi para manajer untuk melakukan EM. Perusahaan menggunakan EM untuk mengurangi *earnings* pada periode munculnya regulasi untuk mengurangi *political sensitivity* (Watts dan Zimmerman, 1989, dalam Patten dan Trompeter, 2003).

2.1.2. Political Cost Hypothesis

Political cost hypothesis memperkenalkan dimensi politik dalam pemilihan metode akuntansi oleh perusahaan (Scott, 2006). Berdasarkan Watts dan Zimmerman (1990, dalam Scott, 2006), *political cost hypothesis* menyatakan bahwa semakin besar *political cost* yang dihadapi perusahaan, maka manajer lebih cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat menanggukhan *reported earnings* dari periode saat ini ke periode yang akan datang. Selain memilih peraturan akuntansi tertentu, manipulasi laba juga dapat dilakukan dengan kebijakan penilaian masalah tertentu, seperti umur ekonomis aset untuk mempengaruhi angka depresiasi, estimasi piutang ragu-ragu serta estimasi lainnya yang digunakan untuk provisi dan penghapusan piutang (Godfrey *et al.*, 2003).

Besarnya *earnings* yang dilaporkan oleh perusahaan akan menjadi perhatian berbagai elemen *stakeholder*. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan yang melaporkan *earnings* yang cukup tinggi pada suatu periode, karyawan akan berpendapat bahwa *earnings* tersebut dihasilkan dari eksploitasi karyawan. Ini mendorong karyawan untuk menuntut gaji yang lebih tinggi pada karyawan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perusahaan mengurangi *reported earnings* (Godfrey *et al.*, 2003).

Perhatian berbagai elemen *stakeholder* yang besar memicu sebuah keadaan yang disebut *political heat* dalam perusahaan dan politikus akan meresponnya dengan kemunculan undang-undang atau peraturan perpajakan (Scott, 2006) untuk melindungi *stakeholder*. Perusahaan yang *politically sensitive* cenderung akan mengurangi laba (Godfrey, *et al.*, 2003). *Political cost* yang

dikhawatirkan muncul mendorong perusahaan untuk mengurangi *reported earnings* dengan memilih prosedur akuntansi tertentu yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan akan lebih sulit untuk mengkritik perusahaan dengan laba rendah melalui peraturan-peraturan pemerintah. Dengan demikian, kecaman politikus terhadap perusahaan dan tuntutan dari *stakeholder* akan berkurang.

2.1.3. Corporate Social Disclosure (CSD)

Sejumlah penelitian tentang informasi CSD dalam laporan tahunan menggunakan teori legitimasi untuk menjelaskan hasil penelitian mereka. Teori legitimasi menempatkan perusahaan untuk harus menunjukkan kepedulian terhadap hak publik atas perusahaan dan bukan hanya hak investor. Jika perusahaan tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan peraturan sosial, masyarakat akan bertindak dengan mengambil hak perusahaan untuk meneruskan operasinya (Deegan dan Rankin, 1997).

Teori legitimasi menyatakan bahwa praktek pengungkapan oleh perusahaan adalah cara untuk membangun dan mempertahankan legitimasi perusahaan yang berpengaruh terhadap opini dan peraturan publik (Tilt dan Symes, 1999). Ini menunjukkan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan alat legitimasi. Teori legitimasi menempatkan perusahaan pada usaha terus-menerus untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan tekad dan norma yang dapat diterima masyarakat (Van Der Laan, 2009).

Cho *et al.* (2009) menyatakan bahwa teori legitimasi merupakan akar dari kontrol sosial. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gozhali dan Chariri (2007)

bahwa kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi telah melandasi timbulnya teori legitimasi. Lebih lanjut, Deegan (2002) berpendapat aspek penting dalam teori legitimasi adalah kebutuhan perusahaan untuk menyediakan kebutuhan informasi legitimasi yang berhubungan dengan publik.

Informasi yang *reliable* penting untuk menguatkan legitimasi kepada stakeholdernya, seperti yang dikatakan oleh Suchman (1995) dalam Raar (2007) bahwa:

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.”

Oleh sebab itu, teori legitimasi mendorong peningkatan transparansi laporan. Untuk mencapai legitimasi, perusahaan harus menunjukkan kepatuhan terhadap standar sosial. Kesalahan perusahaan untuk melegitimasi aktivitas CSR memungkinkan munculnya peraturan pemerintah untuk mengurangi keresahan publik (Raar, 2007).

Cho *et al.* (2009) menyatakan bahwa pengungkapan CSR melalui berbagai media, baik laporan tahunan, website maupun media lainnya, merupakan sebuah alat legitimasi perusahaan. Deegan (2002; dalam Gunawan, 2007) membuktikan bahwa pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan dilakukan untuk tujuan legitimasi. Sedikitnya peraturan mengenai pengungkapan informasi CSR, hanya akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi yang terpaksa dilakukan. Atas dasar tersebut, Deegan berpendapat bahwa tingginya tingkat

pengungkapan hanya akan terjadi ketika perhatian publik kuat atau ketika adanya regulasi yang spesifik.

Nik Ahmad *et al.* (2003) menyatakan bahwa teori legitimasi menunjukkan cara perusahaan menjalankan bisnisnya dan melaporkan aktivitasnya dipengaruhi oleh nilai masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan berada. Oleh sebab itu, jika perusahaan peduli terhadap perubahan persepsi dan kesadaran publik terhadap tanggung jawab perusahaan secara sosial, perusahaan akan berusaha untuk mencapai legitimasi. Dengan kata lain, perusahaan akan merespon peningkatan kesadaran publik dengan meningkatkan CSD dalam laporan tahunan.

Pengungkapan CSR atau sering disebut dengan *Corporate Social Disclosure* (CSD) telah menjadi fokus banyak penelitian akademik sejak pertengahan 1970-an (Nik Ahmad *et al.*, 2003). Guthrie dan Mathews (1985, dalam Hackston dan Milne, 1996) mendefinisikan CSD sebagai provisi informasi finansial dan nonfinansial yang berhubungan dengan interaksi perusahaan dengan lingkungan fisik dan sosial, yang diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan sosial terpisah. Sedangkan Ghozali dan Chariri (2007) mendefinisikan pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai proses yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan.

Tidak adanya standar mengenai tipe informasi yang harus diungkapkan dalam CSD, membuat tipe informasi yang disajikan beragam. Untuk tercapainya harmoni, *integrity* dan transparansi dalam pengkomunikasian informasi CSD diperlukan adanya *minimum standard reporting guideline*. Beberapa rekomendasi

muncul dari berbagai organisasi. Salah satunya adalah *Global Reporting Initiative (GRI) guidelines*. Pengapdosian format CSD yang distandardisasi, misalnya *GRI principles*, dilakukan untuk mengurangi ketidakkonsistenan isi pelaporan CSD (Raar, 2002) dan diharapkan dapat memudahkan stakeholder untuk dapat lebih memahami CSD yang dilaporkan perusahaan.

Dalam GRI guidelines, informasi yang CSD yang dilaporkan perusahaan berisi beberapa aspek, yaitu:

- a. Kinerja ekonomi
- b. Kinerja lingkungan
- c. Tenaga kerja
- d. *Human Rights*
- e. Masyarakat
- f. Produk

Hal ini sejalan dengan Hackston dan Milne (1996) yang mengkategorikan tipe informasi CSD sebagai berikut:

- a. Lingkungan
- b. Energi
- c. Tenaga kerja
- d. Produk
- e. Masyarakat

Menurut Deegan (2002) ada beberapa motivasi yang mendasari manajer untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungannya, yaitu:

- a. Keinginan untuk mematuhi persyaratan legal. Di beberapa negara, hal ini bukan merupakan motivasi utama karena ternyata di negara-negara tersebut tidak banyak peraturan tentang pengungkapan informasi sosial dan lingkungan (Deegan, 2000).
- b. Pertimbangan *economic rationality*. Yang dipandang sebagai motivasi utama adalah kemungkinan adanya keuntungan bisnis atas menunjukkan “hal yang benar” (Friedman, 1962)
- c. Keyakinan dalam akuntabilitas atau tanggung jawab untuk melaporkan. Pandangan manajer bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan (Hasnas, 1998; Donaldson dan Preston, 1995; Freeman dan Reed, 1983) tanpa mempedulikan biaya yang berkaitan. Akan tetapi pandangan seperti ini bukan merupakan pandangan utama perusahaan bisnis dengan sistem kapitalis,
- d. Keinginan untuk mematuhi persyaratan dalam peminjaman. Meningkatnya lembaga peminjaman yang mensyaratkan peminjam untuk secara periodik menyediakan berbagai macam informasi tentang peraturan dan aktivitas sosial dan lingkungan mereka.
- e. Untuk memenuhi harapan masyarakat. Hal ini kemungkinan merupakan refleksi atas pandangan bahwa kepatuhan terhadap “izin yang diberikan masyarakat untuk beroperasi” (atau “kontrak sosial”) tergantung pada penyediaan informasi kinerja sosial dan lingkungan (Deegan, 2002).
- f. Sebagai hasil dari adanya ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Misalnya, pelaporan mungkin dianggap sebagai respon terhadap pemberitaan negatif

media, dampak sosial dan lingkungan tertentu, atau sebagai akibat dari pemberian rating rendah oleh lembaga pemberi peringkat perusahaan (Deegan *et al.*, 2000; 2002; Patten 1992).

- g. Untuk mengelola kelompok stakeholder tertentu (Ullman, 1995; Roberts; 1992; Evan dan Freeman, 1988; Neu *et al.*, 1988).
- h. Untuk menarik dana investasi. Secara internasional, “*ethical international funds*” merupakan bagian dari pasar modal yang semakin meningkat, misalnya the *Dow Jones Sustainability Group Index*. Orang yang bertanggung jawab untuk memberikan rangking kepada perusahaan tertentu untuk tujuan investasi portfolio menggunakan sumber informasi dari sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut,
- i. Untuk mematuhi persyaratan industri atau *code of conduct* tertentu.
- j. Untuk mencegah adanya peraturan pengungkapan baru,
- k. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu.

Di Indonesia praktek pelaporan CSD semakin menguat dengan disahkannya Undang-undang No.40 Pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- “(1)Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3)Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.”

Berbagai dampak negatif beroperasinya perusahaan terhadap lingkungan dan sosial melatarbelakangi terbentuknya UU ini. UU ini bukan hanya berlaku bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam saja tapi mencakup seluruh perusahaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan adanya UU ini, diharapkan adanya peningkatan pelaporan CSD.

Aktivitas maupun praktek pelaporan CSR yang dilakukan perusahaan akan berdampak pada citra perusahaan itu sendiri (Rahman, 2009). Dengan aktivitas CSR, perusahaan tidak hanya meningkatkan kepuasan stakeholder tetapi juga memberikan dampak positif terhadap reputasi perusahaan (Prior *et al.*, 2008). CSR juga dilakukan untuk mengurangi tekanan politik, kemudiann CSD muncul untuk mengimbangi kinerja lingkungan yang negatif (Patten dan Trompeter, 2008).

Selanjutnya Patten dan Trompeter (2003) juga menyatakan, jika perusahaan menggunakan CSD sebagai alat yang efektif untuk mengurangi tekanan politik maka perusahaan akan melakukan CSD sebelum *political cost* muncul. *Political cost* adalah segala cost yang muncul akibat adanya tindakan politik, mencakup *antitrust*, regulasi, subsidi, pajak dan sebagainya (Han dan Wang, 1998).

Selain itu, teori legitimasi telah menempatkan perusahaan untuk menunjukkan kepedulian terhadap hak publik atas perusahaan dan bukan hanya hak investor. Praktek CSD adalah salah satu cara untuk membangun dan

mempertahankan legitimasi perusahaan. Dengan kata lain CSD merupakan salah satu strategi perusahaan dalam mempertahankan reputasi perusahaan. Untuk dapat memenuhi kepentingannya, *agent* memiliki motivasi untuk menghindari ancaman *political cost* dengan mempertahankan reputasi perusahaan yang kurang baik akibat kurangnya CSD yang dapat mengancam legitimasi perusahaan dan memicu timbulnya regulasi. Untuk itu berdasarkan *agency theory*, perusahaan akan melakukan *earnings management* untuk mengurangi *reported earnings*. Alasannya adalah karena akan lebih sulit untuk mengkritik perusahaan dengan *reported earnings* yang rendah.

2.1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan untuk mengetahui hubungan dampak tekanan politik terhadap strategi perusahaan dengan menguji *political cost hypothesis*. Penelitian lain menguji hubungan antara praktek CSR dan EM. Penelitian-penelitian tersebut mengasumsikan EM dan CSR sebagai strategi yang digunakan perusahaan dalam mengurangi tekanan politik. Beberapa penelitian juga menyatakan CSR sebagai alat yang efektif memberikan dampak positif terhadap reputasi perusahaan yang rusak akibat praktek EM.

Cahan (1992) melakukan penelitian terhadap 48 perusahaan tahun 1978-1983 yang terkait dengan perlawanan terhadap monopoli yang pada saat itu terjadi. Cahan menguji *political cost hypothesis* terhadap perusahaan-perusahaan yang merupakan target dari tindakan politik "*antitrust*". Penelitian ini menguji efek dari gerakan "*antitrust*" yang berhubungan dengan monopoli terhadap

earnings yang dilaporkan. Hasilnya, adanya indikasi bahwa manajer menyesuaikan *discretionary accruals* sebagai respon atas perubahan *political cost*.

Selanjutnya Cahan *et al.* (1997) melakukan penelitian pada 50 perusahaan kimia di Amerika untuk meneliti *earnings management* pada tahun 1979 saat muncul regulasi pemerintah yang dikenal dengan Superfund. Dengan menggunakan *time series*, Cahan menemukan bahwa perusahaan kimia melakukan manipulasi *discretionary accruals* untuk menurunkan *income* pada saat munculnya regulasi tahun 1979.

Penelitian lain berkaitan dengan *political cost hypothesis* dilakukan oleh Han dan Wang (1998) dengan sampel 76 perusahaan industri petroleum dan gas dengan menggunakan laporan keuangan kuartalan. Periode yang diteliti adalah saat terjadinya Persian Gulf Crisis 1990 yang berakibat pada kenaikan harga minyak sehingga perusahaan menikmati kenaikan *earnings* yang cukup besar. Penelitian ini menguji apakah perusahaan yang *earnings*-nya meningkat menggunakan *accounting accruals* untuk mengurangi *earnings* dalam menghadapi sensitivitas politik. Han dan Wang membuktikan bahwa perusahaan minyak yang mendapat keuntungan besar akan menggunakan *accruals* untuk mengurangi *income* kuartalannya selama Gulf crisis.

Sumedi (2010) meneliti mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap 47 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006 dan 2008. Hasilnya faktor kepemilikan saham pemerintah, regulasi pemerintah,

tipe perusahaan dan ukuran industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Sementara itu, kepemilikan saham asing dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia

Hubungan antara *environmental disclosure* dan EM telah diteliti oleh Patten dan Trompeter (2003). Sampel penelitian ini adalah 40 perusahaan kimia yang terkena dampak dari *chemical leak* di Bhopal, India. Kejadian ini menimbulkan tekanan politik yang cukup besar dan mengarah pada terjadinya *political cost*. Patten dan Trompeter mengatakan bahwa CSR dan EM merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif *political cost*. Pengukuran EM berdasarkan residual atau perubahan pada *discretionary accruals*. Hasil penelitian Patten dan Trompeter membuktikan adanya *discretionary accruals* negatif yang signifikan pada periode terjadinya Bhopal chemical leak. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan positif antara *environmental disclosure* dengan *discretionary accruals*. Perusahaan dengan tingkat *environmental disclosure* yang rendah pada periode sebelum Bhopal chemical leak cenderung mengurangi income dengan *discretionary accruals* yang negatif pada periode terjadinya Bhopal chemical leak.

Chih *et al.* (2008) menguji empat hipotesis yang berkaitan dengan hubungan CSR dengan EM. *Myopia avoidance hypothesis*, berdasarkan hubungan negatif yang terjadi antara CSR dan EM; *predictable earnings hypothesis*; *multiple earnings hypothesis*, yang menunjukkan hubungan positif antara CSR dan EM; dan yang terakhir adalah *institutional hypothesis*, yang menunjukkan

hubungan netral antara CSR dan EM. Mereka melakukan penelitian efek CSR terhadap informasi yang disajikan dengan sampel 1.653 perusahaan di 46 negara periode 1993-2002.

Prior *et al.* (2008) meneliti hubungan CSR dan EM dengan dasar asumsi praktek EM akan berpengaruh negatif atas hubungan perusahaan dengan *stakeholder* dan reputasi perusahaan. Untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan kepuasan *stakeholder* perusahaan melakukan praktek CSR. Dengan menggunakan sampel 593 perusahaan dari 26 negara tahun 2002 dan 2004, penelitian ini membuktikan adanya hubungan positif antara CSR dengan EM dan kombinasi praktek CSR dan EM yang berdampak negatif terhadap kinerja finansial perusahaan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Pengarang	Tahun	Sampel	Hasil
Cahan	1992	48 perusahaan	Adanya indikasi manajer menyesuaikan <i>discretionary accruals</i> sebagai respon atas perubahan dalam <i>political cost</i>
Cahan <i>et al.</i>	1997	50 perusahaan kimia yang diindikasikan terkena dampak Superfund	Berdasarkan analisis <i>time series</i> , perusahaan kimia melakukan pengurangan income dengan menggunakan <i>discretionary accruals</i> pada periode tahun 1979 dan tidak pada 1978 dan 1980

Han dan Wang	1998	76 perusahaan industri petroleum dan gas	Perusahaan menggunakan akuntansi persediaan dan item khusus untuk mengurangi <i>earnings</i> yang dilaporkan pada periode meningkatnya sensitivitas politik
Patten dan Trompeter	2003	40 perusahaan kimia tahun 1974-1998	Perusahaan dengan tingkat <i>environmental disclosure</i> rendah cenderung lebih banyak melakukan <i>discretionary accruals</i> negatif dibanding dengan perusahaan yang memiliki tingkat <i>environmental disclosure</i> yang tinggi
Chih <i>et al.</i>	2008	1.653 perusahaan dari 46 negara	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan CSR akan menurunkan <i>income smoothing</i> • Peningkatan CSR akan meningkatkan <i>income aggressiveness</i> • Peningkatan CSR akan menurunkan <i>earnings losses avoidance</i>
Prior <i>et al.</i>	2008	593 perusahaan dari 26 negara	Praktek EM akan merusak reputasi perusahaan. Untuk memperbaiki reputasinya, perusahaan melakukan praktek CSR . Praktek EM berdampak positif terhadap CSR.
Sumedi	2010	47 perusahaan yang terdaftar di BEI 2006	Faktor kepemilikan saham pemerintah, regulasi pemerintah, tipe

		dan 2008	perusahaan dan ukuran industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Sementara itu, kepemilikan saham asing dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia
--	--	----------	---

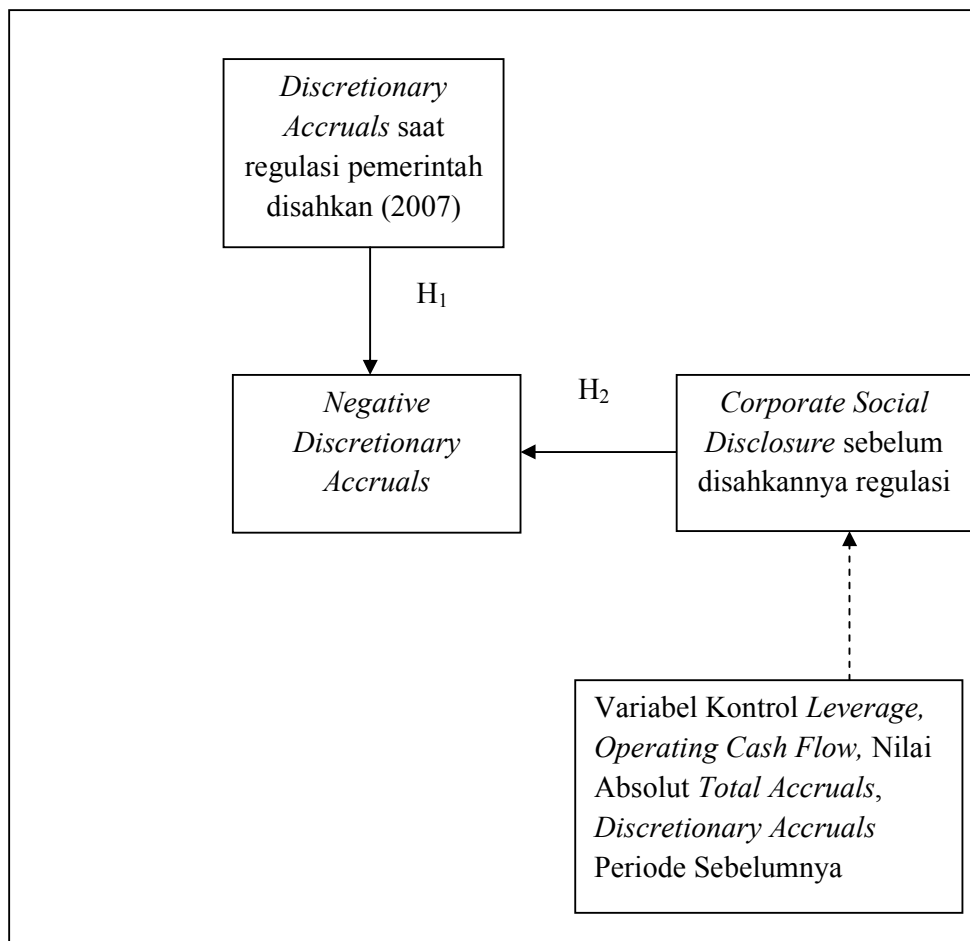
2.2. Kerangka Pemikiran

Munculnya konsep CSR didorong oleh tuntutan dari *stakeholder* untuk meningkatkan kesadaran perusahaan atas dampak tindakan perusahaan terhadap kualitas kehidupan manusia, terhadap individu, masyarakat dan seluruh lingkungan disekitarnya. Ini dilatarbelakangi maraknya peristiwa yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena kerusakan lingkungan akibat beroperasinya perusahaan. Kesalahan perusahaan dalam melegitimasi aktivitasnya memunculkan regulasi pemerintah yaitu, UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

CSR dan EM digunakan perusahaan sebagai alat untuk meningkatkan citra perusahaan dan mengurangi tekanan politik. Perusahaan yang menggunakan CSR sebagai alat untuk menghindar dari ancaman *political cost* akan melakukan praktek CSD pada periode sebelum *political cost* terjadi. Perusahaan juga

memiliki insentif untuk melakukan EM pada periode munculnya ancaman *political cost*, yang terukur dari perubahan *discretionary accruals*.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah menguji praktek EM dan hubungannya dengan CSD, serta disahkannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka variabel independen dalam penelitian ini adalah CSD yang mempengaruhi *discretionary accruals* sebagai variabel dependen penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3. Perumusan Hipotesis

2.3.1. *Discretionary Accruals*

Earnings Management berhubungan dengan penggunaan *discretionary accruals* untuk memanipulasi *earnings* yang dilaporkan (Patten dan Trompeter, 2003). Beberapa penelitian menggunakan *discretionary accruals* sebagai alat untuk menguji adanya praktek EM sebagai salah satu strategi dalam menghadapi tekanan politik dan *political cost*. *Discretionary accruals* telah digunakan secara luas dalam menguji adanya praktek *earnings management* karena merupakan komponen dari *accruals* yang dapat dimanipulasi oleh manajer. Penelitian yang dilakukan oleh Cahan (1992), Cahan *et al.* (1997), Han dan Wang (1998) serta Patten dan Trompeter (2003) menguji *political cost hypothesis* dan menemukan adanya *discretionary accruals* yang lebih *earnings-reducing* pada periode meningkatnya tekanan politik terhadap perusahaan.

Disahkannya regulasi pemerintah, yaitu Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk tekanan politik pemerintah terhadap perusahaan. Sebagai strategi untuk menghadapi dampak negatif *political cost* yang muncul, perusahaan menggunakan *discretionary accruals* untuk mengurangi *earnings* yang dilaporkan pada periode munculnya tekanan politik. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pada periode tahun 2007 perusahaan melakukan *negative discretionary accruals*.

2.3.2. Luas *Corporate Social Disclosure* (CSD)

Corporate social disclosure dan *earnings management* merupakan alat yang digunakan perusahaan sebagai strategi untuk mengurangi dampak negatif tekanan politik. Perusahaan memiliki dorongan untuk mempertahankan citra positif melalui penurunan *earnings* yang dilaporkan. Sedangkan melalui praktek CSR dan pelaporannya, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak perlakuan yang lebih menguntungkan berkenaan dengan regulasi, serta mendapatkan dukungan dari kelompok aktivis sosial, legitimasi dari komunitas industri, dan pemberitaan positif dari media (Castelo dan Lima (2006, dalam Prior *et al.*, 2008). Sehingga pada akhirnya reputasi perusahaan dapat terjaga dengan baik.

Penelitian oleh Chih *et al.* (2008) dan Prior *et al.* (2008) menunjukkan adanya hubungan positif antara CSR dan EM dalam konteks konsekuensi negatif yang muncul akibat EM terhadap *stakeholder* dan reputasi perusahaan yang kemudian dampaknya dikurangi dengan melakukan aktivitas CSR. Penelitian oleh Patten dan Trompeter (2003) yang menggunakan *discretionary accruals* untuk mengukur EM, menunjukkan adanya hubungan positif antara *environmental reporting* dan *discretionary accruals*. Penelitian yang menganalisis hubungan *environmental reporting* dan *discretionary accruals* ini dilakukan dalam konteks sebagai respon atas adanya ancaman regulasi akibat Bhopal chemical leak. Perusahaan dengan tingkat *environmental disclosure* yang rendah pada periode sebelum Bhopal chemical leak cenderung mengurangi income dengan *discretionary accruals* yang negatif pada periode terjadinya Bhopal chemical leak.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mewajibkan seluruh perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam untuk mengungkapkan kegiatan CSR-nya. Munculnya regulasi pemerintah merupakan salah satu bentuk tekanan politik yang berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan dan berpotensi memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan. Atas alasan tersebut perusahaan memiliki insentif untuk melakukan strategi yang dapat mengurangi dampak dari tekanan politik (Cahan, 1992; Cahan *et al.*, 1997; Han dan Wang, 1998; Patten dan Trompeter, 2003). Untuk menghindari dampak negatif tindakan pemerintah serta *political cost* yang potensial muncul atas regulasi pemerintah mengenai CSR, perusahaan melakukan praktek EM. Perusahaan dengan tingkat CSD yang rendah cenderung akan melakukan EM yang dapat mengurangi *reported earnings*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Luas CSD pada periode sebelum disahkannya regulasi pemerintah berpengaruh positif terhadap *discretionary accruals*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menganalisis secara empiris praktek EM dan mengenai hubungan luas CSD dengan EM yang diukur berdasarkan perubahan *discretionary accruals*. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis yang telah diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan menurut metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang akurat.

3.1.1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat dalam penelitian ini perubahan *discretionary accruals*. Sesuai dengan Cahan (1992), Han dan Wang (1998) serta Patten dan Trompeter (2003), bukti adanya EM adalah analisis perubahan dalam *discretionary accruals*. Cahan *et al.* (1997) mendefinisikan *discretionary accruals* sebagai bagian dari total akrual yang dapat diubah oleh manajer tanpa melanggar GAAP.

Definisi total akrual yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Cahan *et al.* (1997) yang juga digunakan oleh Patten dan Trompeter (2003), yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Total Accruals} = & (\text{Current assets}_{it} - \text{Current asset}_{it-1}) - (\text{Cash}_{it} - \text{Cash}_{it-1}) - \\ & (\text{Current liabilities}_{it} - \text{Current liabilities}_{it-1}) - \text{Depreciation} \\ & \text{expense}_{it} \quad (3.1) \end{aligned}$$

Dalam penelitian ini digunakan model *discretionary accruals* dari Han dan Wang (1998) yang juga digunakan Patten dan Trompeter (2003) yang diestimasi sebagai selisih dari *total accruals* dan *non discretionary accruals*. Dalam model tersebut, *discretionary accruals* diestimasi sebagai residual dari:

$$TTAC_{it}/AST_{it} = B_0 + B_1(\Delta REV_{it}/AST_{it}) + B_2(PPE_{it}/AST_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

Dimana:

$TTAC_{it}$ = total akrual perusahaan i pada tahun t

ΔREV_{it} = perubahan penjualan perusahaan i tahun t ($REV_{it} - REV_{it-1}$)

PPE_{it} = *net property, plant and equipment* perusahaan i tahun t

AST_{it} = *total asset* perusahaan i tahun t

3.1.2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat CSD perusahaan yang dilaporkan dalam laporan tahunan. CSD adalah data yang diungkapkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan (Hackston dan Milne, 1996). Metode yang sering digunakan untuk pengukur CSD adalah metode *content analysis*. Hackston dan Milne (1996) dan Krippendorff (1980, dalam Raar, 2002) mendefinisikan *content analysis* sebagai “*a research technique for making replicable and valid inferences from data according their context*”. Holsti (1969) menyatakan bahwa penelitian dengan *content analysis* harus didukung dengan kategorisasi yang mencerminkan pertanyaan penelitian, dengan sejumlah kategorisasi yang berhubungan dengan penelitian sebelumnya (Tilt, 1998 dalam Raar, 2002).

Pengukuran CSD dilakukan dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan, apabila item informasi tidak ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 0, dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 1. Pengungkapan sosial menunjukkan seberapa luas butir-butir pengungkapan yang disyaratkan telah diungkapkan.

Kategorisasi tema CSD yang digunakan dalam penelitian ini adalah tema pengungkapan yang dikembangkan oleh Hackston dan Milne (1996) yang telah dimodifikasi oleh Sembiring (2005) dan mencakup memuat tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Skema kategori tema informasi dan definisinya dapat dilihat di lampiran A.

Pengukuran variabel CSD menggunakan model tanpa pembobotan, sehingga memperlakukan semua item informasi yang diungkapkan secara sama. Berdasarkan Munif (2010) alasan pengukuran tanpa pemberian bobot adalah sebagai berikut:

1. Laporan tahunan ditujukan untuk pihak umum sehingga para pemakai memiliki persepsi yang berbeda-beda.
2. Menghindari subjektivitas pembobot.

Penelitian ini hanya menggunakan laporan tahunan sebagai sumber utama informasi dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut (Alrazi *et al.*, 2009):

- a. Penggunaan laporan tahunan akan konsisten dengan penelitian sebelumnya (Hakston dan Milne, 1996; Nik Ahmad dan Sulaiman, 2004; De Villers dan Van Staden, 2006).
- b. Laporan tahunan merupakan sumber informasi utama bagi stakeholder (Wiseman, 1982; Tilt 1994).
- c. Dibandingkan dengan media pengungkapan yang lain, laporan tahunan memiliki tingkat kredibilitas yang paling tinggi (Tilt, 1994; Gray *et al.*, 1995; Neu *et al.*, 1998; Unerman, 2000).
- d. Kemudahan akses laporan tahunan perusahaan (Gray *et al.*, 1995; Unerman, 2000; Wilmshurst dan Frost, 2000) dan merupakan hal yang tidak mungkin untuk meneliti seluruh jenis alat komunikasi perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas CSR-nya untuk jangka waktu yang cukup lama (Gray *et al.*, 1995; Campbell, 2004).
- e. Keterbatasan tersedianya laporan CSR yang berdiri sendiri, misal *sustainability report* (ACCA, 2002; Thompson dan Zakaria, 2004).

3.1.3. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol untuk memastikan bahwa hubungan yang ditemukan antara variabel dependen dan independen bukan dihasilkan dari variabel-variabel terkait lainnya (Hilman dan Keim, dalam Monika, 2008). Penelitian sebelumnya oleh Reynolds dan Francis (2001, dalam Chang *et al.*, 2010) menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *discretionary accruals*, yaitu *leverage*, *operating cash flow*, nilai absolut atas *total accruals*, dan *discretionary accruals* periode sebelumnya. Seperti Chang *et al.*

(2010) penelitian ini menggunakan *leverage*, *operating cash flow*, nilai absolut *total accruals* dan *discretionary accruals* periode sebelumnya sebagai variabel kontrol.

3.1.3.1. *Leverage*

Beberapa penelitian telah menguji hubungan antara *leverage* dengan *discretionary accruals*. DeFond dan Jiambalvo (1994, dalam Chang *et al.*, 2010) menyatakan hubungan yang positif antara *leverage* dan *discretionary accruals*. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi memiliki insentif yang besar untuk menggunakan *discretionary accruals* dalam meningkatkan *earnings* yang dilaporkan sehubungan dengan semakin dekatnya batas pelunasan. *Leverage* didefinisikan sebagai rasio atas total hutang dibagi dengan total aset.

3.1.3.2. *Operating Cash Flow*

Chang *et al.* (2010) mendefinisikan *operating cash flow* sebagai arus kas dari aktivitas operasi dibagi dengan total aset. Dechow (1994, dalam Chang *et al.*, 2010) dan Dechow *et al.* (1995, dalam Chang *et al.*, 2010) berpendapat bahwa perubahan pada *cash flow* terjadi karena operasi normal atau manipulasi *accruals*. Hasil penelitian Chang *et al.* (2010) menyatakan bahwa *operating cash flow* memiliki hubungan yang negatif dengan *discretionary accruals*.

3.1.3.3. Nilai Absolut *Total Accruals*

Berdasarkan Chang *et al.* (2010) penelitian ini menggunakan nilai absolut *total accruals* dibagi dengan total aset sebagai variabel kontrol. Selanjutnya Chang *et al.* menyatakan bahwa perusahaan dengan *total accruals* yang tinggi cenderung memiliki *discretionary accruals* yang besar (Krishnan, 2003).

Koefisien untuk pengaruh nilai absolut *total accruals* terhadap *discretionary accruals* diprediksikan positif.

3.1.3.4. *Discretionary Accruals* Periode Sebelumnya

Chang *et al.* (2010) menyatakan bahwa besarnya manipulasi *earnings* pada periode sekarang dipengaruhi oleh manipulasi *earnings* yang dilakukan manajer pada periode sebelumnya. Untuk mengendalikan hal ini, *discretionary accruals* periode sebelumnya digunakan sebagai variabel kontrol. Dalam penelitiannya, Chang *et al.* (2010) menyatakan bahwa *discretionary accruals* periode sebelumnya memiliki korelasi negatif dengan *discretionary accruals* periode yang diteliti.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan non finansial yang terdaftar atau telah *go public* pada Bursa Efek Indonesia tahun 2005 sampai 2009, yang tercantum dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2009. Adapun jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menurut Indonesian Capital Market Directory 2009 adalah sejumlah 283 perusahaan. Penggunaan perusahaan-perusahaan non finansial didasarkan pada pertimbangan peneliti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sudah cukup mewakili sebagai suatu sampel penelitian.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah suatu porsi atau bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Lind dan Manson, 1996). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan

kriteria yang di tentukan sehingga dapat memberikan informasi yang diharapkan (Sekaran, 2003).

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah:

- a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-2009.
- b. Perusahaan termasuk dalam perusahaan non finansial.
- c. Perusahaan menyajikan laporan tahunannya dalam *website* perusahaan atau *website* BEI.
- d. Laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan menyertakan informasi yang terkait dengan CSR pada periode tahun 2006.
- e. Laporan tahunan perusahaan memiliki data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa laporan tahunan periode 2005-2009 yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dapat diperoleh di *website* perusahaan atau www.idx.co.id dan data yang dikeluarkan oleh Institute for Economics and Financial Research dalam *Indonesian Capital Market directory* (ICMD). Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

1. Lebih mudah memperolehnya, jika dibandingkan data primer.
2. Biayanya lebih murah.

3. Penggunaan laporan tahunan dan laporan keuangan masing-masing perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik, sehingga data terpercaya keabsahannya.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi, dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tahun 2005-2009. Data tersebut diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh BEI, yakni www.idx.co.id, *website* perusahaan, data dari ICMD, studi pustaka atau literatur melalui buku teks, artikel, jurnal dan sumber data tertulis lainnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan, juga dijadikan sumber pengumpulan data.

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme sebuah proses dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian *discretionary accruals* dan CSD. Alat analisis data ini disajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi absolut yang menggambarkan angka-angka prosentase, rata-rata, median, kisaran dan standar deviasi (Ghozali, 2006).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi

normal. Ada dua cara untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006). Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena jika tidak hati-hati secara visual terlihat normal padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping analisis grafik dilengkapi dengan uji statistik (Ghozali, 2006). Alat yang digunakan dalam pengujian ini adalah analisis dengan grafik histogram dan grafik *normal probability plot* serta uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik (Ghozali, 2006) adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2006):

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

H_0 ditolak jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, yang berarti data residual terdistribusi tidak normal. Dan H_0 diterima jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0.05, yang berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* <0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 dengan tingkat kolonieritas 0,95.

3.5.2.3. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Penelitian ini menggunakan Run test untuk mendeteksi ada tidaknya autokolerasi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau sistematis (Ghozali, 2006).

3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji statistik dengan melakukan *Uji White* untuk model (3.3) dan *Uji Glejser* untuk model (3.4).

Uji White dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen. Software yang digunakan untuk melakukan Uji White dalam penelitian ini adalah *evIEWS*. Data dapat dikatakan tidak mengandung masalah Heteroskedastisitas jika $p > 0,05$. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual (*absRes_1*) sebagai variabel dependen dengan variabel independen tetap. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas.

3.5.3. Uji Hipotesis

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan.

Adapun tahap-tahap penghitungan dan pengolahan data sebagai berikut:

1. Menghitung total skor kategori item CSD.
2. Menghitung *discretionary accruals* setiap tahun.

3. Regresi model.

Metode regresi linier dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Model *time series* digunakan dalam penelitian ini. Data *time-series* digunakan untuk mengetahui adanya manipulasi *earnings* yang ditandai dengan *discretionary accruals* negatif.

Penggunaan data *time series* dapat memberikan gambaran hubungan residual tiap periode. Han dan Wang (1998) serta Chang *et al.* (2010) menyatakan bahwa model *time series* digunakan untuk menguji apakah atau bagaimana praktek EM selama periode yang diteliti. Variabel perubahan penjualan dan *net property, plant and equipment* digunakan untuk mengendalikan *non discretionary accruals* (Han dan Wang, 1999; Patten dan Trompeter, 2003).

3.5.3.1. Uji Hipotesis Pertama (H₁)

Munculnya regulasi pemerintah yaitu disahkannya UU No. 40 Tentang Perseroan Terbatas Tahun 2007 diasumsikan mempengaruhi insentif untuk melakukan EM. Seperti Patten dan Trompeter (2003) jika perusahaan tidak terpengaruh terhadap tekanan politik akibat munculnya regulasi tersebut, perusahaan tidak akan melakukan EM. Han dan Wang (1998) menambahkan variabel indikator untuk menguji EM pada periode yang menjadi objek penelitian, yang pada penelitian ini yaitu tahun 2007. Model dengan variabel indikator ini digunakan untuk menemukan adanya manipulasi *earnings* pada periode tahun 2007. Model tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$TTAC_{it}/AST_{it} = B_0 + B_1(\Delta REV_{it}/AST_{it}) + B_2 (PPE_{it}/AST_{it}) + B_3 T_{2007} + \varepsilon_{it} \quad (3.3)$$

Keterangan:

$TTAC_{it}$ = total akrual perusahaan i pada tahun t

ΔREV_{it} = perubahan penjualan perusahaan i tahun t ($REV_{it} - REV_{it-1}$)

PPE_{it} = *net property, plant and equipment* perusahaan i tahun t

AST_{it} = *total asset* perusahaan i tahun t

T_{2007} = variabel indikator

T_{2007} adalah indikator yang didesain untuk tahun 2007 dimana bernilai 1 untuk tahun 2007 dan 0 untuk tahun yang lainnya. Jika perusahaan sampel memanipulasi *discretionary accruals* untuk mengurangi *earnings* pada periode disahkannya regulasi pemerintah, koefisien untuk T_{2007} diperkirakan negatif.

3.5.3.2. Uji Hipotesis Kedua (H₂)

Hubungan antara *discretionary accruals* dan CSD diuji menggunakan model sesuai dengan penelitian Patten dan Trompeter (2003) dengan penambahan variabel kontrol yang digunakan oleh Chang *et al.* (2010), yaitu:

$$DACC_{it} = B_0 + B_1 DISC_{it-1} + B_3 LEV_{it} + B_4 CFO_{it} + B_5 ABSTA_{it} + DACC_{it-1} + \varepsilon_i \quad (3.4)$$

Keterangan:

$DACC_{it}$ = *discretionary accrual* perusahaan i tahun t

$DISC_{it-1}$ = skor *corporate social disclosure* perusahaan i tahun $t - 1$

LEV_{it} = *leverage* perusahaan i tahun t

CFO_{it} = *operating cash flow* dibagi dengan total aset perusahaan i tahun t

$ABSTA_{it}$ = nilai absolut *total accruals* dibagi dengan total aset perusahaan i tahun t

$DACC_{it-1}$ = *discretionary accrual* perusahaan i tahun $t-1$

$DACC_{it}$ merupakan *discretionary accruals* perusahaan i tahun 2007. Nilainya sesuai dengan perhitungan residual dari *discretionary accruals model* dan bukan merupakan nilai absolut.

3.5.4. Uji Goodness of Fit

3.5.4.1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

3.5.4.2. Uji Signifikansi Stimultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ghozali (2006) mengatakan bahwa untuk menguji hipotesis digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa apabila nilai F lebih besar daripada 4, maka hipotesis awal dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, hipotesis alternatif yang

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen dapat diterima.

3.5.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh sebuah variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji t digunakan untuk menemukan pengaruh yang paling dominan antara masing-masing variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5 %.